

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menjelaskan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dibuat dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Kebijakan dan Program yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan strategis merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik agar demokratis, transparan, akuntabel dan terukur. Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa No.50 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, maka perlu adanya penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa untuk menyediakan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan yang berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023.

Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Kabupaten Minahasa. Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Renstra OPD atau Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2013 tentang RPJMD pasal 3 menjelaskan bahwa RPJMD merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 tahun, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berpedoman pada RPJM Daerah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good governance* (partisipatif, transparan dan akuntabel).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan yang mengacu pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2018-2023 merupakan acuan bagi Dinas dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun kedepan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai input bagi penyusunan dokumen RPJMD dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa yang merupakan dokumen internal dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa.

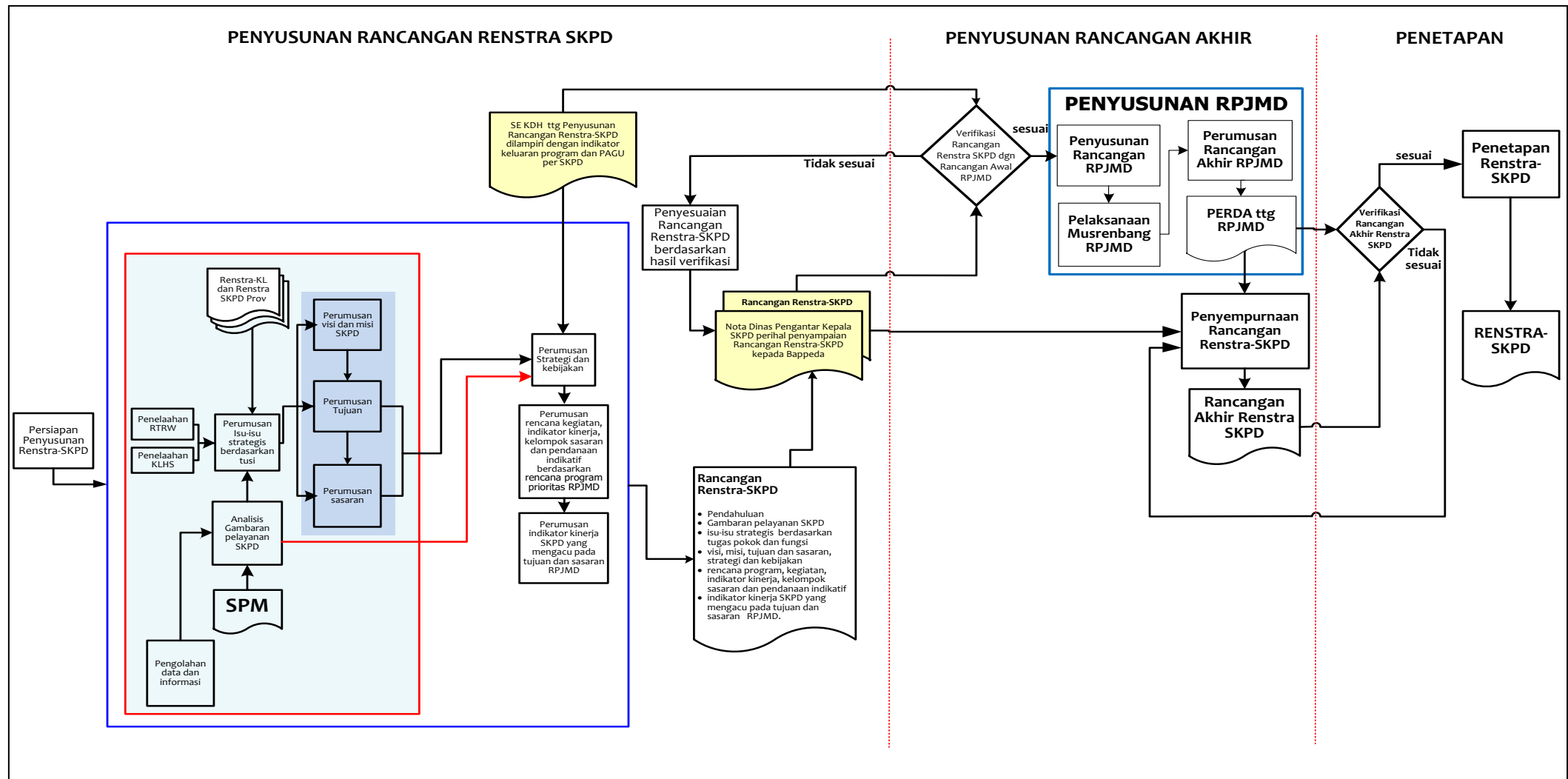
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa tahun 2018 - 2023 mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2018-2023, telah melalui beberapa langkah penyempurnaan, dengan melakukan penajaman pada tujuan, sasaran, outcome, output dan kegiatan berdasarkan perubahan lingkungan strategis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA). Pembuatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa 2018-2023 tersebut, melibatkan seluruh komponen internal di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bapelitbangda dan masukan dari berbagai elemen yang lain. Dalam implementasinya, diharapkan seluruh perencanaan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Minahasa mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2018-2023 ini, terutama sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa, juga mengakomodasi kebijakan yang ada dalam RPJMN serta ide dasar visi, misi dan strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2020-2024 (Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 -2024 dan Rencana Strategis Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana propinsi Sulawesi utara 2020-2024.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Secara garis besar tahapan penyusunan Renstra Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Minahasa adalah sebagaimana skema pada gambar 1.1. berikut :

Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang secara umum menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024
  31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
  32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034;
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Minahasa nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023;
38. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa;

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Renstra OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa adalah untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023 yaitu “Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, adil dan Sejahtera” dan mengemban misi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal untuk dipedomani selama lima tahun ke depan.

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa. Adapun tujuan khusus penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa;
2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dalam rangka fasilitasi pembangunan sumber daya manusia melalui keluarga yang berkualitas;
3. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
4. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan serta bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

## 1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023, untuk memudahkan pembahasannya disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.2	Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa
3.3	Telaahan Renstra K/L Dan Renstra BKKBN Provinsi Sulawesi Utara
3.4	Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA

BAB VIII PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA

#### 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa

Berdasarkan peraturan Bupati Minahasa nomor 50 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Dinas serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  3. Sub Bagian Keuangan dan Sarana.
- c. Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) dan Pergerakan, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
  1. Seksi Advokasi dan KIE; dan
  2. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP
- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
  1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
  2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
  3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
  1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
  2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
  1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
  2. Seksi Data dan Informasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.
- g. Jabatan Fungsional

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Minahasa. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
7. Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB;
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga;
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
11. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan; dan
12. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

**Kepala Dinas**, Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Minahasa adalah :

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

2. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas, pelaksanaan program mengacu pada program Nasional dan Daerah;
3. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan tata laksana pelayanan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, kegiatan masing-masing bidang, kegiatan UPT, kegiatan kelompok jabatan fungsional dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
7. Mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis, penyuluhan dan supervisi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. Melaksanakan pemantauan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
9. Mengendalikan urusan administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Menyampaikan laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

**Sekretariat**, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- c. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
- f. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- g. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Sub bagian Perencanaan** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi rencana program dan anggaran Sub bagian Perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana Sub bagian Perencanaan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja;
- g. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan;
- h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Sub bagian Perencanaan sesuai tugas dan kewenangannya;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Sub bagian Perencanaan;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub bagian Perencanaan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Sub bagian Tata Usaha** mempunyai tugas :

1. Menata naskah dinas, agenda, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian, serta pengarsipan dan dokumentasi;
2. Mengurus kebersihan, keamanan, ketertiban dan pemeliharaan gedung kantor;
3. Menyiapkan administrasi Perjalanan Dinas Pegawai dan keprotokolan;
4. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga baik barang bergerak dan tidak bergerak di lingkungan Dinas;
5. Mencatat, menyimpan, mengelola/memelihara dan mendistribusikan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah di lingkungan Dinas, serta menyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik daerah yang ada di lingkungan Dinas;
6. Melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
7. Membuat Daftar Nominatif Pegawai di Lingkungan Dinas;
8. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
9. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Dinas;
10. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan, analisis beban kerja dan volume kerja di lingkungan Dinas; dan
11. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Sub bagian keuangan dan sarana** mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- c. Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
- d. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
- e. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam rangka penyusunan rencana anggaran;
- g. Melakukan kegiatan pengelolaan keuangan mengenai intensifikasi penerimaan, efisiensi dan efektifitas pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- h. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan;
- i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- j. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan pelaporan;



- k. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bidang Penyuluhan dan Penggerakan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di bidang pendampingan, pemberdayaan masyarakat, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Seksi Advokasi dan KIE** mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan di bidang advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
- b. Menyiapkan bahan pembimbingan, penyuluhan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang advokasi dan KIE dan Penggerakan;
- c. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang advokasi dan KIE;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi dibidang advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP** mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan di bidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
- b. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
- c. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi dibidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;

- e. Melaksanakan pembinaan lini lapangan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bidang Keluarga Berencana** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah dan daerah serta kebijakan teknis dibidang keluarga berencana; Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-KB;
- e. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana KB;
- f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Seksi pengendalian dan pendistribusian Alat kontrasepsi** mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan di bidang pengendalian dan pendistribusian Alokon;
- b. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan di bidang pengendalian dan pendistribusian Alokon;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon.

**Seksi Jaminan Pelayanan KB** mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan jaminan pelayanan KB;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan jaminan pelayanan KB;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB** mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
- c. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan KB;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah dan daerah serta kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga balita (BKB);
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan remaja (BKR);
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan (BKL/R);
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. Pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga** mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dibidang kesejahteraan keluarga;
- b. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan dibidang kesejahteraan keluarga;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kesejahteraan keluarga;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan kesejahteraan keluarga;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Seksi bina ketahanan keluarga** mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dibidang ketahanan keluarga;

- b. Melakukan bahan pembimbingan dibidang ketahanan keluarga;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketahanan keluarga;
- d. Pengkoordinasian penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Bidang Pengendalian Penduduk** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Seksi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk** mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- b. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; dan
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

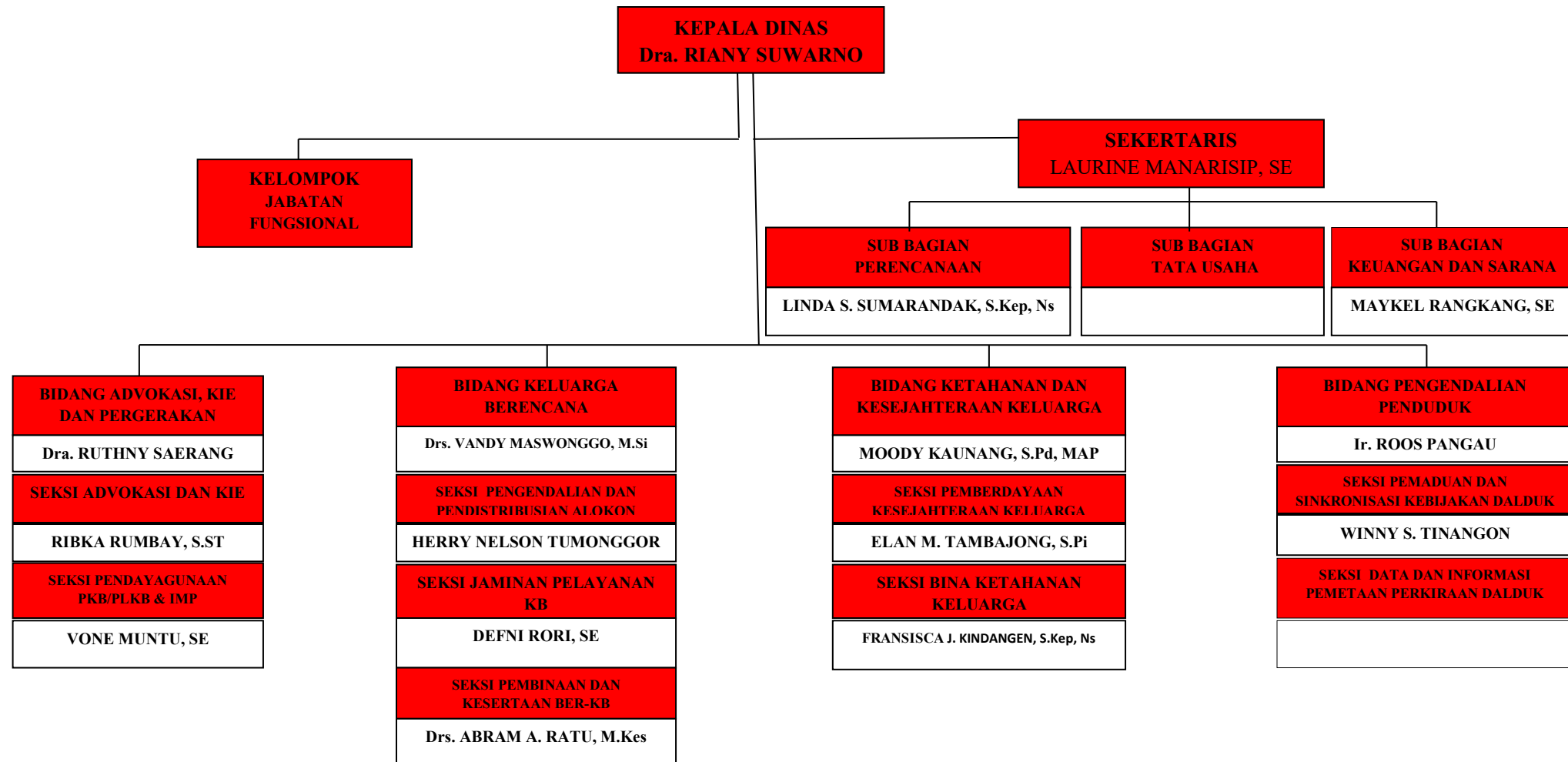
**Seksi data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk** mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- b. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; dan
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### ***Kelompok Jabatan Fungsional***

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

**Tabel 2.1 STRUKTUR ORGANISASI**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA**



## 2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa

Dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Kondisi kepegawaian di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa memiliki sumber daya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil. Adapun susunan kepegawaian terdiri dari pejabat struktural yaitu 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 4(empat) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 8(Delapan) orang Kepala Seksi, 3 (tiga) orang Staf.

Tabel berikut ini menjelaskan Kondisi kepegawaian menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan:

**Tabel 2.2.1 Jumlah PNS menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

No	Golongan/Ruang	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-III	D-1	SLTA	
1	IV/c		1				1
2	IV/b		1				1
3	IV/a	2	2				4
	Jumlah Golongan IV						
4	III/d	1	2			1	4
5	III/c		4				4
6	III/b		1			1	2
7	III/a		1				1
	Jumlah Golongan III						
8	II/c					1	1
9	II/b					1	1
	Jumlah Golongan II						
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>12</b>			<b>4</b>	<b>19</b>

**Tabel 2.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

No.	Uraian	Volume	Keterangan	Keadaan
1	Gedung Kantor	1 Unit		Baik
2	Balai Penyuluhan KB	20 Unit		Baik
3	Mobil Dinas	1 Unit		Baik
4	Mobil Operasional	4 Unit	Muyan 1 Unit	Rusak Berat
			Mobil Akseptor 1 Unit	Baik
			Mupen 2 Unit	1 Rusak Berat
				1 Baik
5	Motor Operasional	84 Unit	17 Unit	Rusak
			67 Unit	Baik
6	Meja Pimpinan	1 buah		Baik
7	Meja ½ Biro	20 Buah	15 buah	Baik
			5 buah	Rusak Ringan
8	Meja Panjang	13 buah		Baik
9	Meja Rapat	1 buah		Baik
10	Filling Cabinet	3 buah		Rusak
11	Sofa	3 set	2 set	Baik
			1 set	Rusak



12	Kursi Ukir Berlengan	11 Buah		Baik
13	Kursi Plastik	15 Buah		Rusak berat
14	Personal Computer PC	10 Unit		Baik
15	Lap Top	8 buah	5 unit	Baik
			3 unit	Rusak
16	Printer	26 unit	6 buah	Baik
			20 buah	Rusak
17	Telp/fax	1 unit		Baik
18	Camera	1 buah		Rusak
19	Lemari Arsip	8 buah	7 buah	Baik
			1 buah	Rusak
20	Lemari Buku	1 buah		Baik
21	AC	3 unit		Baik
22	Kipas Angin	2 buah		Baik

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### Kabupaten Minahasa

Kinerja Pelayanan OPD Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota sebagai berikut :

- A. Sub Urusan Pengendalian Penduduk
  - a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian penduduk;
  - b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota.
- B. Sub Urusan Penyuluhan dan Penggerakan
  - a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local;
  - b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- C. Sub Urusan Keluarga Berencana
  - a. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan.
- D. Sub Urusan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - a. Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sejahtera;
  - b. Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia;
  - c. Pengkoordinasian Pelaksanaan Gerakan bersama Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

**Table 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target indikat or lainnya	Target renstra tahun					Realisasi capaian tahun					Rasio Capaian tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga				2,36	2,30	2,24	2,18	2,12	2,36	2,30	2,36	2,05	2,12	1	1	1,05	0,94	1
2	Cakupan pasangan usia subur yg isterinya dibawah usia 20 tahun				3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,32%	1	1	1	1	0,95
3	Cakupan peserta KB Aktif				0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,90	0,80	1	1	1	0,94	0,83
4	Rasio Akseptor KB				84,50	86,50	88,50	90,50	92,50	84,50	86,50	84,50	85,07	76,77	1	1	0,95	0,94	0,83
5	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun				30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	29,4%	30,00%	29,4%	30,00%	30,00%	0,98	1	0,98	1	1
6	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta aktif 65%				95,00%	95,00%	95,00%	96,00%	96,00%	93,1%	95,00%	93,1%	96,00%	96,00%	0,98	1	0,98	1	1

7	Cakupan pasangan usia subur yg ingin berKB tidak terpenuhi				6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	5,88%	6,00%	5,88%	5,00%	4,66%	0,98	1	0,98	1	0,93
8	Jumlah PUS peserta KB anggota usaha peningkatan keluarga sejahtera yg berKB 87%				250 PUS	250 PUS	250 PUS	250 PUS	250 PUS	250 PUS	250 PUS	250 PUS	250 PUS	250 PUS	1	1	1	1	1
9	Cakupan Pelayanan kesehatan remaja				21,00%	27,00%	33,00%	39,00%	45,00%	21,98 %	27,00%	33%	39,00%	45,00%	1	1	1	1	1
10	Cakupan anggota bina keluarga Balita berKB 70%				95,00%	95,00%	95,00%	96,00%	96,00%	93,1%	95,00%	95%	96,00%	96,00%	0,98	1	1	1	1
11	IMR 2%				2,80%	2,60%	2,40%	2,20%	2,00%	2,74%	2,60%	2,40%	2,20%	2,00%	0,97	1	1	1	1
12	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun				100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	95%	100,00 %	95%	100%	100%	0,95	1	95	1	1
13	Persentase meningkatnya Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita				65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	65,00	70,00	65,00	80,00	85	1	1	0,87	1	1

14	Rasio Petugas Pendamping Bina Keluarga				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1	1	1	1	1
15	Ratio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 desa/ kelurahan				0,20	0,24	0,26	0,28	0,30	0,20	0,24	0,20	2,28	0,30	1	1	0,77	1	1
16	Tersedianya kajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1	1	1	1	1

Cakupan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi fasilitas kesehatan (faskes) KB dan jejaring KB, sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3.2 Cakupan Faskes Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

No	Faskes KB & Jejaring KB	Yang ada	Yang Dilaporkan
1	Jumlah Faskes KB Pemerintah	24	24
2	Jumlah Praktek Dokter melayani KB	2	2
3	Jumlah Praktek Bidan Mandiri Melayani KB	36	36

Selain fasilitas kesehatan, cakupan pelayanan juga meliputi wilayah kecamatan dan kelurahan, petugas KB kecamatan, petugas KB Kelurahan/desa, Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) serta kelompok kegiatan KB, BKB, BKR, UPPKS sebagaimana dalam Tabel berikut :

**Tabel 2.3.3 Cakupan Wilayah Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	Jumlah Yang ada	Jumlah Laporan
1	Kecamatan	25	25
2	Desa/Kelurahan	270	270
3	PLKB/PKB/Petugas KB Desa	12 Org	12 Org
4	PPKBD	270 Org	270 Org
5	Sub PPKBD	1200 Org	1200 Org
6	Kelompok Kegiatan BKB	310	82
7	Kelompok Kegiatan BKR	91	41
8	Kelompok Kegiatan BKL	98	33
9	Kelompok Kegiatan UPPKS	205	37

10	Jumlah PIK R/M	71	27
----	----------------	----	----

**Tabel 2.3.4 Data Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	Jumlah
1.	Angka Kelahiran Total tinggi (Total Fertility Rate / TFR). (Jumlah Angka Kelahiran per WUS 15-49 tahun)	2,06% anak lahir hidup
2.	Angka Kelahiran Remaja tinggi (ASFR/ Age Specific Fertility Rate 15-19 tahun). (Jumlah kelahiran hidup per 1000 Wanita kelompok umur 15-19 tahun)	47%/1000
3.	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern rendah (Contraceptive Prevalence Rate/CPR). (Persentase PUS yg sedang menggunakan alkon/cara KB)	79,54%
4.	Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) rendah. (Persentase pemakai MKJP diantara peserta KB)	24%
5.	Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi tinggi (Unmeet need)	9,68%
6.	Peserta KB Aktif	77%

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

Terkait Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar (pelayanan non dasar) yang kewenangannya secara konkuren telah dibagi menjadi 4 (empat) sub urusan yang telah diatur pembagian kewenangannya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Renstra Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Tahun 2018 - 2023 ini juga harus dapat mengakomodir berbagai kegiatan prioritas yang

mempertimbangkan sinergitas dari 4 (empat) sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk,
- 2) Keluarga Berencana (KB),
- 3) Keluarga sejahtera,
- 4) Penyuluhan dan Penggerakan.

Prediksi keadaan lima tahun kedepan secara manajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### 1. Faktor Internal

##### a. *Strength* (Kekuatan)

1. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
2. Cakupan Pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang cukup besar di Kabupaten Minahasa.
3. Sumber daya manusia/pegawai
4. Petugas Lapangan KB baik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/desa

##### b. *Weakness* (Kelemahan)

1. Kualitas sumber daya manusia masih kurang
2. Sumber daya manusia/pegawai
3. Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) tentang Program KB belum optimal. Banyak kalangan beranggapan program KB sebagai program konsumtif dan tidak begitu penting. Padahal manfaat program KB tidak semata-mata untuk saat ini saja, akan tetapi merupakan investasi untuk masa yang akan datang. Karena melalui pengendalian jumlah penduduk, kesehatan ibu dan anak akan lebih terjaga, keluarga lebih harmonis, kebutuhan hidup keluarga lebih tercukupi dan pada tahap selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
4. Pengembangan dan pemberdayaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam program KB belum optimal. Institusi Masyarakat Pedesaan dalam program KB merupakan organisasi kelompok maupun perorangan sebagai pengelola program KB di tingkat desa dan dusun. IMP terdiri dari



PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) yang bertugas di tingkat desa dan Sub PPKBD yang bertugas di tingkat Dusun. 6 (Enam) Peran bakti IMP meliputi : a. Pengorganisasian b. Pertemuan c. KIE dan Konseling d. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran e. Pelayanan Kegiatan f. Kemandirian

5. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga belum maksimal, dalam hal ini pelaksanaan tugas kader pengelola kelompok ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga (BKB,BKR, BKL, dan UPPKS) belum optimal

## 2. Faktor Eksternal

### a. *Opportunities* (Peluang)

1. Cakupan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang cukup luas dan meliputi berbagai golongan masyarakat;
2. Peran serta masyarakat cukup besar dalam partisipasi dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Adanya sumber dana dan program yang diluncurkan dari BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi.

### b. *Threats* (Tantangan/Ancaman)

1. Pengetahuan masyarakat dengan akses dan kualitas serta metode keluarga berencana terutama Metode Jangka Panjang masih rendah. Tingkat kesertaan ber KB PUS (Pasangan Usia Subur ) masih rendah, masih banyak tidak memakai kontrasepsi (unmet need) masih cukup tinggi terutama yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
2. Pengaruh era globalisasi dan arus informasi yang terbuka mempengaruhi gaya hidup bebas remaja. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah.
3. Partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah. Hal ini selain disebabkan oleh keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi laki-laki, juga oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi

Setelah diketahui faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinteraksikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
  1. Sumber daya manusia khususnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mampu melayani cakupan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga yang cukup luas.
  2. Daya gunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai kinerja yang ditetapkan.
- b. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
  1. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia dan wawasan dengan melalui Seminar.
  2. Perbanyak jumlah sarana dan prasarana Dinas dengan pengajuan anggaran pengadaan sarana dan prasarana baik di dinas maupun yang akan digunakan oleh Penyuluh Lapangan KB dan alat distribusi alat kontrasepsi.
  3. Sumber daya (dana) dari BKKBN pusat dan provinsi yang dapat digunakan untuk meningkatkan persediaan alat kontrasepsi dan alat serta prasarana pengendalian penduduk.
- c. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
  1. Laksanakan kinerja pemeriksaan secara konsisten berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
  2. Meningkatkan advokasi dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi kepada generasi muda.
- d. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
  1. Melaksanakan Penyuluhan oleh PLKB sesuai standar.
  2. Tingkatkan sosialisasi dan advokasi sesuai dengan aturan atau juklak yang ada.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan  
Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<p>Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan terstruktur untuk KIE/promosi Program Bangga Kencana.</p> <p>Angka kelahiran total secara nasional masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang,</p>	<p>➤ Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk.</p> <p>➤ Komitmen dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program kampung KB sebagai upaya pelaksanaan Program Bangga Kencana belum dapat dilaksanakan secara continue</p> <p>➤ Partisipasi PUS dalam ber-KB masih sangat rendah</p>	<p>✓ Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan.</p> <p>✓ integrasi program lintas sektor terkait masih minim</p> <p>✓ Kurangnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap program KKBPK terutama yang terkait kebijakan, perencanaan program dan penganggaran;</p> <p>✓ Tingginya angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan <i>unmet need</i></p>

	<p>serta perhatian tingginya TFR dan demografi wilayah.</p> <p>perlunya terhadap disparitas kondisi antar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Program KB dianggap sebagai upaya membatasi jumlah anak dalam keluarga sementara PUS masih menginginkan anak lebih dari satu</li> <li>➤ Pengembangan dan pemberdayaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam program KB belum optima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masih kurangnya PUS yang tidak memakai kontrasepsi (unmet need) terutama menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</li> <li>✓ Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus disampaikan;</li> <li>✓ Kurangnya Pelatihan bagi Institusi Masyarakat Pedesaan dalam program KB merupakan organisasi kelompok maupun perorangan sebagai pengelola program KB di tingkat desa dan dusun. IMP terdiri dari PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) yang bertugas di tingkat desa dan Sub PPKBD yang bertugas di tingkat Dusun.</li> </ul>
--	---	---	--

2	Keterpaduan program Bangga Kencana dengan program pembangunan sektor lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program Bangga Kencana baik antar kecamatan dan Kelurahan/Desa</li>   <li>➤ Belum optimalnya Pelaksanaan program ketahanan dan Kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan kelompok kegiatan(Poktan), yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya berKB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurangnya tenaga PKB/PLKB sebagai tenaga penggerak</li> <li>✓ Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga.</li> <li>✓ Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</li> <li>✓ Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga.</li> <li>➤ Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia.</li> </ul>
---	---	---	---

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa

Dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD yang pada intinya menginginkan perwujudan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Minahasa yang lebih sejahtera pada akhir periode RPJMD, yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional dilakukan dengan penataan dan perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia aparatur dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas aparatur maupun yang dapat menunjang aktifitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan mewujudkan Kabupaten Minahasa hebat 2023.

Berdasarkan isu strategis dan hasil analisis permasalahan pembangunan Kabupaten Kabupaten Minahasa maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 sebagai berikut: **“Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera”** Visi ini mengandung lima unsur penting dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 yaitu ekonomi, budaya, berdaulat, adil, dan sejahtera.

Pengertian kelima unsur visi pemerintah daerah diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Maju dalam ekonomi

- a. Mampu memenuhi kebutuhan dasar baik pangan, sandang dan papan sebagai bentuk kemandirian daerah.
- b. Mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif
- c. Mampu meningkatkan penerimaan daerah
- d. Mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita
- e. Mampu meningkatkan kinerja UKM/UMKM/IKM dan koperasi yang berdaya saing
- f. Mampu membangun infrastruktur dasar sesuai standar pelayanan minimum

#### 2. Maju dalam budaya

- a. Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, religius, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing
- b. Kemampuan masyarakat menjaga keragaman dan kekayaan budaya daerah
- c. Kemampuan membangun jati diri dan karakter bangsa melalui revolusi mental dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat dan bernegara
- d. Kemampuan membangun dan menjaga warisan tradisi budaya daerah minahasa sebagai bentuk kearifan lokal dan penghargaan terhadap jati diri masyarakat.

- e. Kemampuan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, dan pengembangan menuju inovasi berkelanjutan
- f. Kemampuan aparatur sipil negara menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud kedaulatan dalam pemerintahan
- g. Kemampuan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan hidup

### 3. Berdaulat

- a. Keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat dalam suasana kerukunan berdasarkan falsafah pancasila
- b. Mampu menyelenggarakan demokrasi yang berkualitas dan berwibawa
- c. Kemampuan pemerintah menegakkan peraturan daerah, mencegah tindak kriminalitas
- d. Kemampuan pemerintah mendorong partisipasi politik masyarakat
- e. Mampu menjaga toleransi hidup antar umat beragama

### 4. Adil

- a. Berhasil melaksanakan standar pelayanan minimum
- b. Berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk
- c. Berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah
- d. Berhasil melaksanakan pengarusutamaan gender di setiap aspek pembangunan
- e. Berhasil dalam perlindungan anak, perempuan dan lansia

### 5. Sejahtera

- a. Berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran
- b. Mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.
- c. Berhasil meningkatkan produktifitas rakyat termasuk kesejahteraan petani dan nelayan
- d. Kemampuan meningkatkan daya saing tenaga kerja di tataran nasional dan internasional
- e. Berhasil mencapai indeks kebahagiaan masyarakat yang berkelanjutan

Berdasarkan visi pembangunan serta identifikasi penjabaran secara umum, maka ditetapkan **Misi** pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata;

3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan
5. Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

Kaitan Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dengan visi dan misi Kepala Daerah adalah :

Misi 1 :Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing

Misi 5 : Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD Terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa**

<b>Visi : <i>Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat adil dan Sejahtera</i></b>				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<i>Misi 1 : Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing</i>	Kuantitas dan kualitas SDM Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan spesifikasi profesi (PKB/PLKB sebagai tenaga penggerak) masih kurang	kuota penerimaan ASN masih terbatas pada jenis profesi tertentu (PKB/PLKB)	Regulasi pemerintah pusat untuk penerimaan dan penempatan PKB/PLKB  program pemerintah daerah untuk mengadakan Petugas Penyuluh Lapangan (PKB/PLKB) daerah atau pun tenaga kontrak Petugas Penyuluh Lapangan (PKB/PLKB)



Rendahnya Tingkat kesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) ber KB	Partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah	Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Belum tercapainya target unmet needs	Masih rendahnya nya pemahaman PUS tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya Alkon MKJP
	Rendahnya Partisipasi PUS dalam ber-KB	Tersedianya Fasyankes KB
Belum adanya Keterpaduan pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Masih rendahnya nya pemahaman tentang Kampung KB	Kampung Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada masyarakat untuk perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera
		Penguatan Integrasi Lintas Sektor
Kurangnya Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan Kelompok Kegiatan	Banyak jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang ada	program pemerintah daerah untuk mengadakan Petugas Penyuluh Lapangan (PKB/PLKB) daerah atau pun tenaga kontrak Petugas Penyuluh Lapangan (PKB/PLKB)

3	Misi 5 : Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	(Poktan)	Belum optimalnya Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan kelompok kegiatan(Poktan), yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja	dana BOKB untuk pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program Kependudukan, Keluarga, dan Pembangunan Keluarga (KKBPk).
			(BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya berKB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA)	Ketersediaan Dana DAK berupa sarana/kit (BKB Kit, BKL Kit, Genre Kit) untuk Kelompok Kegiatan (Poktan) Tribina
		Manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal	Masih rendahnya pemahaman aparaturnya tentang Tugas pokok dan fungsi masing-masing	Regulasi pemerintah Daerah tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
			Terbatasnya anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah	Ketersediaan Dana BOKB dalam menunjang program KKBPk
			Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan	Tersedianya standarisasi harga satuan barang dan jasa
			Jumlah ASN tidak sesuai beban kerja	Tersedianya Anjab/ABK

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Berkaitan dengan Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

Sasaran strategis BKKBN 2020-2024 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2020-2024, yaitu:

- 1) Menurunnya angka kelahiran total;
- 2) Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern;

- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi;
- 4) Menurunnya angka kelahiran remaja;
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga;
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan.

Untuk mencapai sasaran strategis, BKKBN menetapkan sasaran program yang akan di capai dalam kurun waktu 2020 – 2024 yaitu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, serta mewujudkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Untuk pencapaian ini ditetapkan sasaran Program, sasaran kegiatan dan keluaran/output di Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang merupakan program teknis dengan sasaran kegiatan :
  - a. Meningkatnya pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di seluruh tingkatan wilayah. Beberapa Keluaran/Output yang menunjang sasaran kegiatan ini adalah :
    - Pembinaan pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah.
    - Promosi 1000 HPK pada keluarga yang memiliki baduta.
    - Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon Ibu.
    - Peningkatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (Tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
    - Keluarga yang mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga.
    - Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
    - Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan.
    - Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes.
    - Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program Bangga Kencana .
  - b. Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan. Beberapa Keluaran/Output yang menunjang sasaran kegiatan ini adalah :
    - Layanan Pendidikan dan Pelatihan
    - Layanan Penelitian dan Pengembangan

2. Program Dukungan Manajemen yang merupakan program generik dengan sasaran kegiatan :
  - a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Beberapa Keluaran/Output yang menunjang sasaran kegiatan ini adalah :
    - Layanan Dukungan Manajemen
    - Layanan Perkantoran
    - Layanan Sarana dan Prasarana Internal
  - b. Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya. Beberapa Keluaran/Output yang menunjang sasaran kegiatan ini adalah :
    - Layanan Audit Internal

Untuk mendukung tercapainya indikator sasaran program ini maka diturunkan menjadi sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di seluruh tingkatan wilayah. Indikator Kinerja Kegiatan **Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KS/PK)** pada sasaran kegiatan ini berupa :
  - a. Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter.
  - b. Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan Generasi Berencana.
  - c. Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia.
  - d. Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS.
  - e. Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan bidang KS/PK didukung dengan adanya beberapa keluaran/output yaitu :

- a. Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah dengan indikator output dan komponen yaitu Persentase kabupaten//kota yang melaksanakan pembinaan pengasuhan dalam rangka pembentukan karakter anak.
- b. Promosi 1000 HPK pada keluarga yang memiliki baduta dengan indikator output dan komponen yaitu Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK.
- c. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu dengan indikator output dan komponen yaitu : 1)

Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR); 2) Jumlah PIK Remaja dan BKR yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu.

- d. Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia dengan indikator output dan komponen yaitu : 1) Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan dalam pelaksanaan Bina Keluarga Lansia (BKL); 2) Persentase PPKS yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi ketahanan keluarga rentan.
- e. Keluarga yang mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan indikator output dan komponen yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga.

Indikator Kinerja Kegiatan **Bidang Pengendalian Penduduk** pada sasaran kegiatan ini berupa :

- a. Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah.
- b. Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB.
- c. Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kabupaten/Kota yang efektif.
- d. Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi.
- e. Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk.
- f. Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan bidang Pengendalian Penduduk didukung dengan adanya keluaran/output yaitu Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dengan indikator output dan komponen sebagai berikut : 1) Cakupan pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Penyusunan Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk); 2) Cakupan koordinasi integrasi indikator Program Bangga Kencana dalam kebijakan pembangunan daerah; 3) Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk dan diregistrasi; 4) Cakupan fasilitasi pengembangan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB; 5) Cakupan fasilitasi penggerakan Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6) Jumlah fasilitasi ke pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pengimplementasian kerjasama pendidikan kependudukan

melalui 3 jalur pendidikan yaitu formal, nonformal, dan informal; 7) Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk; 8) Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB bersama mitra kerja; 9) Persentase mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB bersama mitra kerja.

Indikator Kinerja Kegiatan **Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR)** pada sasaran kegiatan ini berupa :

- a. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP.
- b. Indeks Informasi Metode KB (*Method Information Index/MII*).
- c. Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah.
- d. Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan.
- e. Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan bidang KB/KR didukung dengan adanya beberapa keluaran/output yaitu :

- a. Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan dengan indikator output dan komponen sebagai berikut : 1) Persentase rumah sakit yang pelayanan KB-nya meningkat; 2) Jumlah Tenaga Pelayanan mendapatkan fasilitasi kompetensi (Kumulatif); 3) Peningkatan Jumlah Provider Vasektomi yang Kompeten; 4) Jumlah Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus; 5) Persentase PUS dengan kehamilan risiko tinggi (4 Terlalu); 6) Jumlah kabupaten/ kota dengan PKB/PLKB yang puskesmas di wilayahnya melayani KB Pascapersalinan.
- b. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes dengan indikator output dan komponen yaitu Persentase Faskes teregister yang mendapat ketersediaan Alokasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Indikator Kinerja Kegiatan **Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN)** pada sasaran kegiatan ini berupa :

- a. Persentase stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana.
- b. Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana.
- c. Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik.
- d. Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

- e. Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan bidang ADPIN didukung dengan adanya keluaran/output yaitu Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program Bangga Kencana dengan indikator output dan komponen sebagai berikut:

- 1) Persentase Momenendum Of Understanding (MoU)/Perjanjian Kerja Sama yang di tindaklanjuti unit kerja di BKKBN;
- 2) Persentase KelembagaanPengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten/Kota yang berbentuk Dinas utuh;
- 3) Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi, sasaran dan wilayah;
- 4) Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan unmet need;
- 5) Jumlah pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana;
- 6) Persentase Tim Advokasi Terpadu Lintas Sektor Program Bangga Kencana yang melakukan advokasi;
- 7) Frekuensi pembinaan Kinerja Penyuluh KB dalam pelaksanaan tupoksi dalam mengelola Prgram Bangga Kencana di Wilayah Binaan;
- 8) Cakupan pembinaan IMP dan mekanisme operasional lini lapangan dalam penguatan pelayanan Program Bangga Kencana bagi masyarakat;
- 9) Persentase Penyuluh KB/PLKB yang melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dalam upaya menurunkan Drop Out;
- 10) Persentase cakupan pengelolaan data dan informasi Program Bangga Kencana;
- 11) Cakupan kualitas Layanan Jaringan STIK dan penyebarluasan Informasi

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS)**

Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada dasarnya mempunyai keterkaitan dengan RT/RW dan KLHS dimana dalam hal pengendalian penduduk ada 2 aspek yang dinilai yaitu:

- 1.Aspek kuantitas Penduduk
- 2.Aspek kualitas Penduduk

Untuk aspek kuantitas penduduk berhubungan dengan RT/RW dan KLHS dimana menekan laju pertumbuhan penduduk diharapkan sesuai dengan tata ruang yang ada, sehingga penyebaran penduduk menjadi merata.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dimasa datang. Karena itu dalam melakukan setiap program kegiatan dibutuhkan suatu perhatian khusus sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap output yang dihasilkan. Program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menjadi prioritas daerah (urusan wajib) dalam hal ini merupakan program pro rakyat yang keberpihakan terhadap masyarakat sangat tinggi. Sejalan dengan peningkatan intensitas program terhadap masyarakat akan memeberikan efek meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Berdasarkan kondisi di atas maka isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi
2. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern (*modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)
3. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
4. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum terlayani (*unmet need*)
5. Rendahnya jumlah keluarga yang mengetahui fungsi keluarga
6. Pernikahan Usia Anak



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023, maka visi misi Kabupaten Minahasa adalah :

Visi : **“Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera”**

Misi :

1. Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan; dan
5. Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

Untuk pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Minahasa, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Berpedoman pada Misi 1(Satu) dan Misi 5 (Lima) maka disusun tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

Tujuan 1(satu) : Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas

Sasaran 1(satu): Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk

1. Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan

Sasaran 2(dua): Meningkatkan pembinaan keluarga berencana

2. Meningkatkan avokasi, komunikasi informasi edukasi (KIE) serta kualitas tenaga penyuluh lapangan
3. Meningkatkan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas

Sasaran 3 (tiga): Meningkatkan Pemberdayaan keluarga sejahtera

1. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Tujuan 2 (Dua) : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran 1(satu) :Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah

1. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi yang efektif dan efisien

Secara umum sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018 – 2023 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sasaran khusus yang ingin dicapai sebagai berikut: Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas. Terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan ,profesional dan akuntabel

Untuk mencapai Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka perlu ditetapkan indikator dan target selama 5 (lima) tahun kedepan seperti tabel berikut ini:

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas		Laju Pertumbuhan penduduk	1,5	1,51	1,3	1,2	1
		Sasaran 1: Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,06	2,08	2,08	2,09	2,1
		Sasaran 2 : Meningkatkan pembinaan keluarga berencana	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	79,94%	80,34%	80,74%	81,14%	81,54%
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,96%	16,96%	16%	15,75%	15%
		Sasaran 3: Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	9%	20%	50%	80%	100%

2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		Tingkat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	CC	B	BB	BB	A
		Sasaran 1: Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4	4	4	4	4

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan strategi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tabel berikut dijelaskan keselarasan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023.

**Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Minahasa Maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat adil dan sejahtera			
MISI 1: Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Bersama perangkat Daerah terkait dalam menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Memadukan dan mensinkronisasikan kebijakan dengan pemerintah Daerah Propinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
		Meningkatkan KIE pada Remaja/anak sekolah tentang Kependudukan dan peningkatan usia perkawinan untuk menekan kelahiran usia 15-19 tahun	Melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah

	2. Meningkatkan pembinaan keluarga berencana	Meningkatkan advokasi dan KIE tentang program Bangga Kencana kepala masyarakat	Melaksanakan Advokasi dan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
		didayagunakannya PKB/PLKB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Mendayagunakan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
		Meningkatkan peserta KB Aktif dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Mengendalikan dan mendistribusikan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB
		Meningkatkan Kampung KB yang telah terbentuk menjadi kampung Keluarga berkualitas(KB) yang mandiri	Memberdayakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
	3. Meningkatkan Pemberdayaan keluarga sejahtera	Meningkatkan kelompok kegiatan (Poktan) ber-KB	Melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		Meningkatkan kelompok kegiatan (Poktan) yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Melaksanakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

**MISI 5: Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi
		Meningkatkan pengelolaan keuangan yang didukung administrasi yang baik	Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	daerah	Meningkatkan pengelolaan barang milik Daerah yang didukung administrasi yang baik	Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah
		Meningkatkan pengelolaan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik	Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
		Meningkatkan pengelolaan layanan administrasi umum yang didukung administrasi yang baik	Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
		Menyediakan prasarana sarana aparatur sesuai rencana kebutuhan barang milik (RKBM)	Mengadakan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah
		Menyediakan layanan operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Mengadakan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
		Meningkatkan pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Memelihara Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk rencana aksi kebijakan ditetapkan Program yang akan dilaksanakan dengan sasarannya. Program dan kegiatan yang telah dibuat akan lebih terarah dan lebih jelas disertai indikator yang meliputi indikator program dan indikator kegiatan, indikator dan output memberikan gambaran yang jelas apakah program dan kegiatan menghasilkan keluaran yang saling terkait dan efektif. Program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun akan menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun rencana tahunan dan akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Minahasa. Penyusunan perencanaan yang berdasarkan indikasi diharapkan dapat memudahkan OPD dalam pelaksanaan program tahunan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan dapat berdaya guna bagi kepentingan pembangunan di Kabupaten Minahasa. Estimasi program dan pendanaan yang telah disusun berdasarkan identifikasi keperluan dan telah ditetapkan kelompok sasarannya diharapkan dapat mengarahkan program dan kegiatan tersebut pada objeknya. Dengan adanya perencanaan ini diharapkan nantinya memudahkan pelaksanaan pengendalian sehingga antara perencanaan dan hasil yang diperoleh tidak melenceng dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini



**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Minahasa**

Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	Jumlah anak yang dilahirkan	2,06	2,06	-	2,08	18,550,000	2,08	650,000,000	2,09	50,000,000	2,1	51,000,000	2,1	751,000,000
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	Data	-	-	-	-	9,100,000	1 Dokumen	-	0	50,000,000	0	51,500,000	1 Dokumen	101,500,000
	2.14.02.2.01.01	Penyerasian kebijakan pembangunan daerah kab/kota terhadap kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (program KKBPK)	Jumlah dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten / kota program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana)	Data	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.14.02.2.01.0 2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Jumlah dokumen penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten/kota	Perencanaan pembangunan di Kab. Minahasa	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	50,000,000	-	-	1 Dokumen	50,000,000
2.14.02.2.01.0 3	Dukungan Pelaksanaan survei/Pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan	Jumlah survei/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan	Keluarga di Kab. Minahasa		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.02.2.01.0 4	Pelaksanaan survei/indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan	Jumlah survei/pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan	Masyarakat		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.02.2.01.0 5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah dokumen penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	siswa dan mahasiswa		-	-	-	-	-	-			1 Laporan		6 Laporan	
2.14.02.2.01.0 6	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan non formal	Pramuka dan ASN		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		7 Laporan	

2.14.02.2.01.07	Penyediaan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Jumlah dokume penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Materi Kependudukan		-	-	-	-	-	-	2 Paket		2 Paket		4 Paket	
2.14.02.2.01.08	Penyediaan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan nonformal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan non formal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Materi Kependudukan		-	-	-	-	-	-	2 Paket		2 Paket		4 Paket	
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal	Formal :Sekolah/ perguruan tinggi informal : Kampung KB, Tokoh Agama, Poktan (Tribina)		-	-	-	-	-	-	5 satuan pendidikan		5 Laporan	51,500,000	10 Laporan	51,500,000

2.14.02.2.01.1 0	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	Pramuka dan ASN, sekolah		-	-	2 Laporan	9,100,000	-	-	2 Laporan		2 Laporan		7 Laporan	9,100,000
2.14.02.2.01.1 1	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen hasil pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan	Kelompok Kegiatan		-	-	-	-	-	-	5 Laporan		5 Laporan		12 Laporan	
2.14.02.2.01.1 2	Advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Stakeholder terkait		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.02.2.01.1 3	sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Stakeholder terkait		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	

2.14.02.2.01.1 4	pelaksanaan sarasehan hasil pemuktahiran data keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan sarasehan hasil pemuktahiran data keluarga data keluarga	Sarasehan ke stakeholder		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.02.2.01.1 5	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan rapat pengendalian program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana)	PLKB		-	-	-	-	-	-	-		25 Laporan		50 Laporan	
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)</b>	<b>Perempuan Usia 15-19 Tahun</b>	<b>47 org</b>	<b>34 org</b>	<b>-</b>	<b>32 org</b>	<b>9,450,000</b>	<b>30 org</b>	<b>650,000,000</b>	<b>28 org</b>	<b>-</b>	<b>26 org</b>	<b>-</b>	<b>26 org</b>	<b>650,000,000</b>
2.14.02.2.02.0 1	perumusan parameter kependudukan	Jumlah laporan parameter kependudukan yang dirumuskan	Data/ parameter kependudukan		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.02.2.02.0 2	penyediaan dan pengolahan data kependudukan	Jumlah dokumen penyediaan dan pengolahan data kependudukan	Data kependuduk		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.02.2.02.0 3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Profil kabupaten		-	-	-	-	-	-	1 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen	

2.14.02.2.02.04	pemetaan kependudukan	Jumlah laporan pemetaan kependudukan	Pemetaan kependudukan		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.02.2.02.05	penyusunan kajian dampak kependudukan	Jumlah kajian dampak kependudukan	Kajian dampak kependudukan		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.02.2.02.06	pengembangan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan	Jumlah Dokumen pengembangan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan	Pengendalian dampak kependudukan		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.02.2.02.07	pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan (Early Warning System/peringatan dini)	Jumlah dokumen pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan (Early Warning System/peringatan dini)	Indikator kerentanan dampak kependudukan		-	-	-	-	-	-	1 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen	
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program bangsa kencana (pembangunan keluarga kependudukan, dan keluarga berencana) di sektor lain yang dibentuk	Kampung KB		-	-	10 Laporan	9,450,000	-	-	10 Laporan		10 Laporan		30 Laporan	9,450,000
2.14.02.2.02.09	pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Laporan dalap		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.02.2.02.10	pemanfaatan data hasil pemuktahiran data keluarga	Jumlah data hasil pemuktahiran data keluarga yang dimanfaatkan	Data PK		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah Data ndan informasi keluarga yang tersedianya	Data 25 Kecamatan		-	-	-	-	10 Dokumen	650,000,000	10 Dokumen		5 Dokumen		25 Dokumen	650,000,000

	2.14.02.2.02.1 2	pencatatan dan pengumpulan data keluarga	jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Keluarga di Kab. Minahasa		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
	2.14.02.2.02.1 3	pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah laporan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	laporan dalap dan pelkon		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
	2.14.02.2.02.1 4	pembinaan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Jumlah laporan pembinaan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Laporan KKBPK		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2. Meningkatkan pembinaan keluarga berencana	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	PUS	79,54%	79,94%	2,175,432,500	80,34%	3,207,472,400	80,74%	#####	81,14%	6,188,503,000	81,54%	6,374,158,090	81,54%	17,691,322,040
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	PUS	9,68	8,96%		16,96%		16%	15,75%	15%		15%			
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja		-	49,885,000	-	231,010,000	6	#####	6	1,620,269,000	6	1,668,877,070	6	4,909,415,070

2.14.03.2.01.0 1	Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	Jumlah laporan advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	stakeholders dan mitra kerja		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.03.2.01.0 2	komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah laporan KIE program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Masyarakat		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.03.2.01.0 3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Laporan penyediaan dan distribusi Sarana KIE Program KKBPK	IMP		1 Laporan	49,885,000	1 Laporan	231,010,000	2 Laporan	253,637,000	1 Laporan	253,637,000	1 Laporan	261,246,110	6 Laporan	1,049,415,110
2.14.03.2.01.0 4	promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Laporan promosi KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Masyarakat		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.03.2.01.0 5	penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	Jumlah Laporan penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	IMP dan PLKB		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.03.2.01.0 6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rekorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rekorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	IMP		-	-	-	-	-	-	25 Laporan		25 Laporan		125 Laporan	



2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan KKBPB	Jumlah laporan hasil Kegiatan Balai Penyuluhan KKBPB	PLKB	-	-	-	-	20 Laporan	1,366,632,000	22 Laporan	1,366,632,000	25 Laporan	1,407,630,960	102 Laporan	4,140,894,960
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPB	Jumlah Laporan pengendalian program KKBPB	PLKB	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	24 Laporan	-
<b>2.14.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPB (advokasi dan KIE)</b>	<b>Masyarakat</b>		2,012,150,000		2,809,500,000	<b>36,8%</b>	1,296,000,000	<b>37%</b>	<b>1,296,000,000</b>	<b>37,5%</b>	<b>1,334,880,000</b>	<b>37,5%</b>	<b>3,926,880,000</b>
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPB di lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Laporan Pembinaan IMP dan Program KKBPB oleh PKB/PLKB	Kader IMP	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	24 Laporan	-
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung operasional PKB/PLKB	PLKB	27 Paket	68,150,000	9 Paket	139,500,000	-	-	14 Peket	-	25 Paket	-	64 Paket	<b>207,650,000</b>
2.14.03.2.02.03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPB untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan pelaksanaan penyuluhan, pergerakan untuk petugas KB/penyuluh lapangan KB	PLKB	-	-	-	-	-	-	25 Laporan	-	25 Laporan	-	50 Laporan	-
2.14.03.2.02.04	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP Yang Melaksanakan Pembinaan Program KB bagi Masyarakat	IMP	1467 Kader	1,944,000,000	1467 Kader	2,670,000,000	1467 Kader	1,296,000,000	1470 Kader	1,296,000,000	1470 Kader	1,334,880,000	1470 Kader	8,540,880,000

	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pasangan Usia Subur	24%	33,72%	113,397,500	30,5%	166,962,400	31%	885,392,000	31,5%	1,945,234,000	32%	2,003,591,020	32%	4,834,217,020
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang di visitasi dan di registrasi dan mendapatkan Distribusi alat dan obat kontrasepsi	Fasilitas Kesehatan		68 Faskes	68,340,000	68 Faskes	166,962,400	68 Faskes	162,073,000	68 Faskes	162,073,000	68 Faskes	166,935,190	68 Faskes	726,383,590
	2.14.03.2.03.02	Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah laporan Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alkon pelayanan KB	pengelola dan petugas logistik alkon pelayanan KB		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan MKJP	Pasangan Usia Subur		-	-	-	-	25 Laporan	723,319,000	25 Laporan	723,319,000	25 Laporan	745,018,570	75 Laporan	2,191,656,570
	2.14.03.2.03.04	Penyediaan dukungan Ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	Jumlah laporan dukungan anyoman komplikasi berat dan kegagalan MKJP	PUS MKJP		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
	2.14.03.2.03.05	penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang KB	Jumlah laporan rencana kebutuhan ALOKON dan sarana penunjang pelKB	Faskes		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
	2.14.03.2.03.06	Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan	Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan		-	-	-	-	-	-	2 Unit	1,059,842,000	2 Unit	1,091,637,260	4 Unit	2,151,479,260

2.14.03.2.03.07	pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	Jumlah laporan pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	Akseptor		-	-	-	-	-	-	12 Laporan		12 Laporan		24 Laporan	
2.14.03.2.03.08	pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan pembinaan pel.KB dan kespro di faskes dan jaringan dan jejaringnya	Faskes		-	-	-	-	-	-	60 Faskes		60 Faskes		60 Faskes	
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan kelompok Kegiatan	Jumlah Laporan Kegiatan Promosi dan Konseling kesehatan Reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Faskes dan Poktan	Fasilitas Kesehatan		1 Laporan	45,057,500	-	-	-	-	2 Laporan		2 Laporan		5 Laporan	45,057,500
2.14.03.2.03.11	Dukungan Oprasional pelayanan KB bergerak	Jumlah laporan dukungan oprasional pel.KB bergerak	PUS		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.03.2.03.12	Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran	Jumlah laporan promosi dan konseling KB pasca persalinan dan keguguran	PUS pasca persalinan dan pasca keguguran		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.03.2.03.13	Peningkatan kesertaan KB Pria	Jumlah Laporan peningkatan kesertaan KB pria	Akseptor Pria		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.03.2.04	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif</b>	<b>Kampung KB</b>	-	-	-	-	-	3	#####	5	1,327,000,000	7	1,366,810,000	7	4,020,809,950

	2.14.03.2.04.02	Integrasi pembangunan Lintas Sektor di kampung KB	Jumlah laporan Integrasi pembangunan Lintas Sektor di kampung KB	Kampung KB		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBP di kampung KB	Kampung KB		-	-	-	-	25 Laporan	1,326,999,950	25 Laporan	1,327,000,000	25 Laporan	1,366,810,000	75 Laporan	4,020,809,950
	2.14.03.2.04.04	Pembinaan terpadu Kampung KB	Jumlah laporan pembinaan kampung KB	Kampung KB		-	-	-	-	-	-	45 Laporan		45 Laporan		150 Laporan	
2. Meningkatkan Pemberdayaan keluarga sejahtera	2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kelompok Kegiatan	10%	10%	-	20%	-	50%	19,417,000	80%	50,000,000	100%	51,500,000	100%	120,917,000
	2.14.04.2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	Poktan dan UPPKA	-	81%	-	84%	-	86%	19,417,000	88%	50,000,000	90%	51,500,000	90%	120,917,000
	2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) , Pusat informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil kegiatan pembentukan Sarana Poktan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kelompok Kegiatan		-	-	-	-	-	-	12 Laporan		12 laporan		24 laporan	

2.14.04.2.01.0 2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Poktan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelompok Kegiatan		-	-	-	-	-	-	25 Kit		25 Kit		75 Kit
2.14.04.2.01.0 3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil kegiatan orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan
2.14.04.2.01.0 4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilatih	Kader Poktan		-	-	-	-	-	-	270 Kader		270 Kader		810 Kader
2.14.04.2.01.0 5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil kegiatan penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		-	-	-	-	-	-	12 Laporan		12 laporan		24 laporan

2.14.04.2.01.06	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil kegiatan penyediaan biaya operasional bagi poktan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	kelompok kegiatan		-	-	-	-	-	-	12 Laporan		12 laporan		24 laporan	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil Kegiatan Promosi dan sosialisasi Poktan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Kelompok Kegiatan		-	-	-	-	1 Laporan	19,417,000	2 laporan		2 laporan		5 Laporan	19,417,000
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, Berkelanjutan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Jumlah laporan hasil Kegiatan Promosi dan sosialisasi Poktan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Kader Poktan		-	-	-	-	-	-	2 laporan	50,000,000	2 laporan	51,500,000	22 Laporan	101,500,000
2.14.04.2.01.09	Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	Jumlah Laporan hasil kegiatan penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	Stakeholder terkait		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Laporan Hasil kegiatan penyediaan dan pengembangan materi IPK	IMP dan Poktan		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah laporan hasil kegiatan advokasi dan promosi IPK	IMP dan Poktan		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	

2.14.04.2.01.1 2	Sosialisasi IPK	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi IPK	IMP dan Poktan		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan
2.14.04.2.01.1 3	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil kegiatan pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian IPK	IMP dan Poktan		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan
2.14.01.2.02	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun</b>	<b>wanita usia 25-49 tahun</b>	20	20	-	21	-	21	-	21	-	21	-	21
2.14.01.2.02.0 1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 9BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil kegiatan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Mitra kerja dan Organisasi Masyarakat		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan

	2.14.01.2.02.0 2	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Oprasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil kegiatan pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi dalam penggerakan oprasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
	2.14.01.2.02.0 3	Pelaksanaan peningkatan kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
	2.14.01.2.02.0 4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	jumlah laporan hasil kegiatan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Mitra Kerja		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	2.14.01.2.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPPKB	4	4	4,673,401,34 3	4	4,328,534,40 5	4	3,624,147,00 0	4	3,694,912,55 0	4	3,805,759,92 7	4	11,124,819,47 7



2.14.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disahkan	DPPKB		70%	-	75%	750,000	80%	999,400	85%	4,500,000	90%	4,635,000	90%	10,134,400
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	DPPKB		2 Dokument	-	2 Dokument	-	2 Dokument	499,700	2 Dokument	1,500,000	2 Dokument	1,545,000	8 Dokument	3,544,700
2.14.01.2.01.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	DPPKB		-	-	-	-	-	-	1 Dokument		1 Dokument		2 Dokument	
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Rancangan Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	DPPKB		-	-	-	-	-	-	1 Dokument		1 Dokument		2 Dokument	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah rancangan Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	DPPKB		1 Dokument	-	1 Dokument	750,000	1 Dokument	499,700	1 Dokument	1,500,000	1 Dokument	1,545,000	5 Dokument	4,294,700
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan kinerja instansi pemerintah yang tersusun	DPPKB		-	-	-	-	-	-	1 Dokument	1,500,000	1 Dokument	1,545,000	2 Dokument	3,045,000
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	ASN DPPKB		100%	3,273,134,843	100%	2,943,354,905	100%	#####	100%	3,357,914,000	100%	3,458,651,420	100%	13,116,836,325

2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SPP/SPM Gaji dan TPP yang disusun	ASN DPPKB		30 SPP/SPM	3,273,134,843	30 SPP/SPM	2,942,604,905	28 SPP/SPM	3,356,414,000	30 SPP/SPM	3,356,414,000	37 SPP/SPM	3,457,106,420	37 SPP/SPM	13,112,539,325
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPP/SPM yang di Tatausahakan dan diuji/diverifikasi	DPPKB		12 SPP/SPM		12 SPP/SPM		12 SPP/SPM		12 SPP/SPM		12 SPP/SPM		60 SPP/SPM	
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	DPPKB				1 laporan	750,000	1 laporan	502,000	1 laporan	1,500,000	1 laporan	1,545,000	4 Laporan	4,297,000
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/tribulanan/semesteran SKPD	DPPKB		-	-	-	-	-	-	2 Laporan		2 Laporan		4 Laporan	
2.14.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPPKB		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaporan BMD yang ditetapkan/disahkan</b>	<b>DPPKB</b>		75%	-	80%		85%	-	91%	600,000	93%	618,000	93%	1,218,000
2.14.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	DPPKB		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	

2.14.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan/Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD	DPPKB		-	-	-	-	-	-	4 Laporan	600,000	4 Laporan	618,000	8 Laporan	<b>1,218,000</b>
2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	DPPKB		-	-	-	-	-	-	4 Laporan		4 Laporan		8 Laporan	
<b>2.14.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian</b>	<b>ASN DPPKB</b>	<b>90%</b>	<b>92%</b>	<b>35,000,000</b>	<b>94%</b>	<b>17,500,000</b>	<b>96%</b>	<b>-</b>	<b>97%</b>	<b>17,000,000</b>	<b>98%</b>	<b>17,510,000</b>	<b>98%</b>	<b>34,510,000</b>
2.14.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	ASN DPPKB		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit		1 Unit	
2.14.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Jumlah PHD yang disediakan	ASN DPPKB		35 stel	35,000,000	35 stel	17,500,000	-	-	35 stel	17,000,000	35 stel	17,510,000	140 stel	<b>87,010,000</b>
2.14.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan pelaksanaan sistem Informasi kepegawaian	ASN DPPKB		-	-	-	-	-	-	4 Laporan		4 Laporan		8 Laporan	
2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN DPPKB		-	-	-	-	-	-	2 ASN		2 ASN		8 ASN	
2.14.01.2.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Sosialisasi perundang-undangan yang tersusun	ASN DPPKB		-	-	-	-	-	-	2 Laporan		2 Laporan		4 Laporan	

2.14.01.2.05.1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN DPPKB		-	-	-	-	-	-	35 ASN		35 ASN		35 ASN	
<b>2.14.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi</b>	<b>DPPKB</b>	<b>90%</b>	<b>95%</b>	<b>130,366,500</b>	<b>96%</b>	<b>57,697,500</b>	<b>97%</b>	<b>41,197,100</b>	<b>98%</b>	<b>77,272,550</b>	<b>99%</b>	<b>79,590,727</b>	<b>99%</b>	<b>198,060,377</b>
2.14.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKB		12 Bulan	3,796,000	12 Bulan	1,898,000	12 Bulan	2,997,900	12 Bulan	3,871,000	12 Bulan	3,987,130	12 Bulan	16,550,030
2.14.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKB		12 Bulan	15,899,500	12 Bulan	8,074,500	12 Bulan	14,916,200	12 Bulan	16,808,550	12 Bulan	17,312,807	12 Bulan	73,011,557
2.14.01.2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang disediakan (sesuai jenis yang diadakan) mis ember, sapu, gayung dll	DPPKB		22 Buah	38,171,000	22 Buah	2,195,000	22 Buah	-	22 Buah	4,479,000	22 Buah	4,613,370	110 Buah	<b>49,458,370</b>
2.14.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPKB		12 Bulan	3,000,000	12 Bulan	1,350,000	12 Bulan	4,999,000	12 Bulan	5,814,000	12 Bulan	5,988,420	12 Bulan	<b>21,151,420</b>
2.14.01.2.06.0 6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran Tersedia selama 12 bulan	DPPKB		240 koran	3,600,000	240 koran	3,180,000	240 koran	-	240 koran		240 koran		1200 Koran	6,780,000

2.14.01.2.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah Laporan penyediaan bahan dan material	DPPKB		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		Laporan		2 Laporan	
2.14.01.2.06.08	fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang Terfasilitasi	DPPKB		50 Tamu	2,000,000	50 Tamu	1,000,000	50 Tamu	-	50 Tamu	1,500,000	50 Tamu	1,545,000	250 Tamu	6,045,000
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan /berita Acara Hasil Koordinasi dalam dan luar Daerah	DPPKB		12 Laporan	63,900,000	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	18,284,000	37 Laporan	44,800,000	37 Laporan	46,144,000	110 Laporan	213,128,000
2.14.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai RKBMD SKPD</b>	<b>DPPKB/Masyarakat</b>		<b>75%</b>	<b>994,800,000</b>	<b>80%</b>	<b>1,110,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>-</b>	<b>91%</b>	<b>64,350,000</b>	<b>93%</b>	<b>66,280,500</b>	<b>93%</b>	<b>130,630,500</b>
2.14.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di adakan	Pejabat Ess II		-	-	1 Unit	350,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Unit	350,000,000
2.14.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Masyarakat		29 Unit	600,000,000	-	-	-	-	-		1 Unit		1 Unit	600,000,000
2.14.01.2.07.05	Pengandaan Mebel	Jumlah mabel yang disediakan (sesuai jenis yang diadakan)	DPPKB		5 Buah	9,950,000	-	-	-	-	29 Buah	25,850,000	29 Buah	26,625,500	<b>58 Buah</b>	<b>62,425,500</b>

2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (sesuai jenis yang diadakan)	DPPKB		4 unit	13,500,000	8 Unit	135,000,000	-	-	4 Buah	38,500,000	4 Buah	39,655,000	28 Buah	361,655,000
2.14.01.2.07.07	Pengadaan Aset tetap lainnya	Jumlah Laporan pengadaan aset tetap lainnya	DPPKB		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.01.2.07.08	Pengadaan Aset tak Berwujud	Jumlah Laporan Pengadaan aset tak terwujud	DPPKB		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Terbangun	Masyarakat		1 Gedung	371,350,000	2 Gedung	760,000,000	-	-	2 Gedung		2 Gedung		9 Gedung	1,131,350,000
2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya (sesuai jenis yang diadakan)	Balai Penyuluhan KB		-	-	-	-	-	-	10 Unit		5 Unit		25 Unit	
<b>2.14.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan</b>	DPPKB		<b>92%</b>	<b>101,100,000</b>	<b>94%</b>	<b>139,410,000</b>	<b>96%</b>	<b>152,918,500</b>	<b>98%</b>	<b>151,276,000</b>	<b>100%</b>	<b>155,814,280</b>	<b>100%</b>	<b>307,090,280</b>
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai tersedia	DPPKB		500 Lbr	4,500,000	500 Lbr	2,250,000	500 Lbr	5,050,000	505 Lbr	4,000,000	505 Lbr	4,120,000	2610 Lbr	19,920,000
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKB		12 bulan	9,000,000	12 bulan	9,000,000	12 bulan	14,668,500	12 bulan	14,076,000	12 bulan	14,498,280	12 bulan	61,242,780

2.14.01.2.08.0 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DPPKB		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL tersedia	DPPKB		4 Orang	87,600,000	5 Orang	128,160,000	5 Orang	133,200,000	5 Orang	133,200,000	5 Orang	137,196,000	5 Orang	619,356,000
<b>2.14.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi</b>	<b>DPPKB</b>		<b>75%</b>	<b>139,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>59,822,000</b>	<b>85%</b>	<b>72,116,000</b>	<b>91%</b>	<b>22,000,000</b>	<b>93%</b>	<b>22,660,000</b>	<b>93%</b>	<b>116,776,000</b>
2.14.01.2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)	ASN DPPKB		-	-	-	-	1 Unit	7,966,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,150,000	1 Unit	18,116,000
2.14.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)	ASN DPPKB dan Masyarakat		4 Unit	39,000,000	4 Unit	59,822,000	4 Unit	27,000,000	4 Unit	17,000,000	5 Unit	17,510,000	5 Unit	160,332,000
2.14.01.2.09.0 5	pemeliharaan mebel	Jumlah laporan pemeliharaan mebel yang tersusun	DPPKB		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	

2.14.01.2.09.06	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DPPKB		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diRehabilitasi	Balai Penyuluhan KB		2 Unit	100,000,000	-	-	2 Unit	409,842,000	3 Unit		3 Unit		10 Unit	509,842,000
2.14.01.2.09.10	pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Laporan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	DPPKB		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	
2.14.01.2.09.11	pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	DPPKB		-	-	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA

Rumusan indikator kinerja daerah merupakan ukuran dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD terkait urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Bupati dan Wakil Bupati karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD tahun 2018-2023. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Minahasa terkait pembangunan manusia, ketertiban, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa

Indikator kinerja utama

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	Target					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,02	1,5	1,51	1,3	1,2	1	1
	1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,06	2,06	2,08	2,08	2,09	2,1	2,1
	2. Meningkatkan pembinaan keluarga berencana	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	79,54%	80,34%	80%	80,74%	81,14%	81,54%	81,54%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,68%	8,96%	16,96%	16%	15,75%	15%	15%
	3. Meningkatkan Pemberdayaan keluarga sejahtera	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	10%	9%	20%	50%	80%	100%	100%

**Indikator kinerja kegiatan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	Target					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	47 org	13,36 org	12 org	30 org	28 org	26 org	27 org
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	-	-	-	3	5	7	7
2	Meningkatkan advokasi, komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) serta kualitas tenaga penyuluh lapangan	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	-	-	-	6	6	6	6

		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	-	-	-	36,8%	37%	37,5%	37,5%
3	Meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana yang merata dan berkualitas	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	24%	33,72%	30,5	31%	31,5%	32%	32%
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	-	-	-	76,11%	77,61%	79,1%	79,1%
		Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	-	-	-	29,21%	29,49%	32,42%	32,42%
		Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	-	-	-	37,03%	34,62%	31,11%	31,11%
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	-	-	-	41,59%	41,68%	45,97%	45,97%
4	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	-	81%	84%	86%	88%	90%	90%
		Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	20	20	21	21	21	21	21

## BAB VIII

### P E N U T U P

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa. Renstra ini memuat Visi, Misi, Arah kebijakan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan besertapenganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telahditetapkan .

Renstra inimerupakan dokumen untuk menjadi pedoman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehubungan dengan perkembangan era globalisasi dan era transformasi ilmu pengetahuan dan teKnologi di bidang perencanaan, maka dengan menjabarkan lebih lanjut dalam berbagai aktifitas perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, dengan mengutamakan peran aktif, sikap mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerjaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya.Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 5 lima tahun kedepan sampai dengan tahun 2023. Pada akhirnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap menjunjung tinggi profesionalisme dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan Good Governance.

**KEPALA DINAS PPKB  
KABUPATEN MINAHASA**



**Dra. RIANY S. SUWARNO**  
**PEMBAINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19680414 198902 2 006**

